



Kontribusi Pemberdayaan UMKM Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja (Kuantitatif)

Gustina Masitoh^{1*}, Thamara Idil Fitri Marliana², Angga Pratama³, Chika Dwi Oktavianai⁴, Feri Kurniawan⁵

¹⁻⁵ Universitas Nurul Huda, Indonesia

Email: rusmiati268@gmail.com^{1*}, thamaraidilfitrimarlana@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: rusmiati268@gmail.com¹

Abstract: This research aims to examine the role of empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in driving regional economic development while increasing workforce absorption. This topic is relevant considering the crucial position of MSMEs as the driving force of the local economy and the main source of job creation, although in practice they are still limited by limited internal capacity and access to various resources. This study applies a qualitative approach with a case study design to explore in depth the dynamics, processes, and meaning of MSME empowerment in the local context. Data collection was conducted through semi-structured interviews, limited observations, and documentation reviews with five informants including MSME actors, MSME facilitators, and local government representatives. Informants were determined using purposive and snowball sampling techniques. Furthermore, the data were analyzed thematically using the interactive analysis model of Miles and Huberman. The research findings indicate that MSME empowerment efforts through training programs, mentoring, capital facilitation, and marketing support, including digitalization, have significantly contributed to increasing business capacity, expanding market reach, and sustaining business activities. This capacity building has direct implications for opening up local employment opportunities and strengthening a more inclusive regional economic structure. These results add to the theoretical understanding of MSME empowerment from a local economic development perspective, while also offering practical and policy implications for the formulation of sustainability-oriented MSME empowerment programs. Future research is recommended to cover a broader study area and incorporate a mixed-methods approach to increase the generalizability of the findings.

Keywords: Case Studies; Employment Absorption; MSMEs; Qualitative Research; Regional Economic Development.

Abstrak: Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Topik tersebut relevan mengingat posisi UMKM yang krusial sebagai motor penggerak perekonomian lokal dan sumber utama penciptaan lapangan kerja, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas internal serta akses terhadap berbagai sumber daya. Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus guna menggali secara mendalam dinamika, proses, dan makna pemberdayaan UMKM dalam konteks lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terbatas, serta telaah dokumentasi terhadap lima informan yang meliputi pelaku UMKM, pendamping UMKM, dan perwakilan pemerintah daerah. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, serta dukungan pemasaran termasuk digitalisasi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha, perluasan jangkauan pasar, dan keberlanjutan aktivitas bisnis. Penguatan kapasitas tersebut berimplikasi langsung pada terbukanya kesempatan kerja di tingkat lokal serta memperkokoh struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif. Hasil ini menambah khazahan pemahaman teoretis mengenai pemberdayaan UMKM dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, sekaligus menawarkan implikasi praktis dan kebijakan bagi perumusan program pemberdayaan UMKM yang berorientasi keberlanjutan. Penelitian mendatang direkomendasikan untuk mencakup wilayah kajian yang lebih luas dan mengombinasikan pendekatan metode campuran guna meningkatkan daya generalisasi temuan.

Kata kunci: Penelitian Kualitatif; Pengembangan Ekonomi Regional; Penyerapan Tenaga Kerja; Studi Kasus; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks globalisasi serta perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi sentral dalam agenda pembangunan ekonomi di berbagai negara. Peran sektor ini tidak terbatas pada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam memperkuat fondasi perekonomian daerah. Aktivitas UMKM yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan dan kawasan pinggiran turut mendorong pemerataan hasil pembangunan. Di samping itu, UMKM memiliki kemampuan besar dalam menyediakan kesempatan kerja di tingkat lokal yang bersifat fleksibel dan inklusif. Di banyak negara berkembang, sektor ini berfungsi sebagai sarana penting untuk mereduksi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, pengembangan UMKM dipandang sebagai elemen esensial dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Hayati & Fatarib, 2022).

Pada tataran global, sejumlah penelitian empiris mengonfirmasi bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau Small and Medium Enterprises (SME) memberikan sumbangan yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kontribusi tersebut tampak melalui kemampuan UKM dalam menciptakan peluang kerja baru serta meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, UKM berperan signifikan dalam menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah yang tidak didukung oleh keberadaan industri skala besar. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di negara berkembang terserap pada sektor ini. Relevansi UKM semakin menguat dalam situasi ekonomi global yang rentan terhadap guncangan krisis. Dengan karakter yang relatif adaptif, UKM mampu bertahan dan menjadi penopang stabilitas perekonomian lokal (Hapsari, Apriyanti, Hermiyanto, & Rozi, 2024).

Di Indonesia, UMKM secara konsisten dipandang sebagai pilar utama perekonomian nasional yang memiliki tingkat ketahanan tinggi. Lebih dari 99 persen unit usaha nasional berasal dari sektor UMKM, yang menandakan dominasinya dalam struktur ekonomi nasional. Sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tergolong besar dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Kegiatan UMKM mencakup berbagai bidang usaha, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, hingga industri kreatif. Persebarannya yang luas di berbagai wilayah menjadikan UMKM sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai agen pembangunan (Hayati & Fatarib, 2022).

Informasi terkini dari berbagai lembaga mengindikasikan bahwa UMKM mampu menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja di Indonesia. Proporsi tersebut mencerminkan besarnya peran UMKM dalam menyediakan kesempatan kerja bagi sebagian besar masyarakat. Sektor ini menjadi pilihan utama bagi tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal. Selain itu, UMKM berkontribusi dalam pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan pekerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Peran tersebut menempatkan UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang bersifat inklusif. Oleh sebab itu, keberlangsungan UMKM memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional (Hayati & Fatarib, 2022).

Kendati memiliki posisi yang strategis, UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural maupun operasional. Akses yang terbatas terhadap sumber permodalan menjadi hambatan utama dalam upaya pengembangan skala usaha. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital yang masih rendah turut melemahkan daya saing UMKM di tengah tuntutan ekonomi modern. Tantangan lain yang kerap dijumpai adalah keterbatasan kapasitas manajerial serta lemahnya perencanaan usaha. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan inovasi. Apabila tidak disertai dengan intervensi kebijakan yang tepat, potensi besar UMKM dalam menopang perekonomian lokal sulit untuk dimanfaatkan secara optimal (Kholifah & Andini, 2024).

Kompleksitas persoalan tersebut semakin mengemuka apabila dikaitkan dengan realitas ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih berlangsung di Indonesia. Kawasan perkotaan umumnya memiliki ekosistem UMKM yang relatif lebih berkembang karena ditopang oleh ketersediaan infrastruktur, akses teknologi, serta jaringan pasar yang lebih kuat. Sebaliknya, wilayah perdesaan kerap dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dasar, sistem logistik, dan akses informasi yang menghambat pertumbuhan UMKM. Situasi ini menyebabkan kesenjangan kapasitas dan tingkat daya saing UMKM antarwilayah semakin melebar. Selain itu, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal turut membentuk pola pengembangan UMKM yang beragam di setiap daerah. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan UMKM perlu dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah (Murdani & Hadromi, 2019).

Dalam kerangka pemberdayaan UMKM, pendekatan yang diterapkan tidak lagi sebatas pada penyaluran bantuan permodalan. Pemberdayaan yang efektif menuntut pemahaman komprehensif terhadap dinamika inovasi sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Di samping itu, kolaborasi dalam tata kelola multi-pihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, kalangan akademisi, dan komunitas lokal menjadi komponen krusial. Sinergi antaraktor

tersebut berpotensi membentuk ekosistem usaha yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan juga dibutuhkan agar pelaku UMKM mampu merespons perubahan pasar yang cepat. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi (Ibrahim, 2022).

Pendekatan pemberdayaan yang bersifat menyeluruh mencakup berbagai bentuk intervensi yang saling terhubung. Pelatihan kewirausahaan berfungsi untuk memperkuat kemampuan perencanaan serta pengelolaan usaha secara sistematis. Pendampingan manajerial membantu pelaku UMKM dalam menangani persoalan operasional dan mengambil keputusan strategis secara lebih tepat. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pasar. Melalui proses digitalisasi, UMKM dapat menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien. Rangkaian upaya tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai ekonomi (Purnomo & Purwandari, 2025).

Ditinjau dari sudut pandang pembangunan ekonomi daerah, peran UMKM melampaui sekadar aktivitas produksi barang dan jasa. UMKM turut menggerakkan perekonomian lokal melalui penciptaan interaksi permintaan dan penawaran di tingkat komunitas. Keberadaan UMKM mendorong sirkulasi uang di daerah serta memperkuat basis ekonomi yang berakar pada masyarakat lokal. Selain itu, UMKM berkontribusi dalam menekan arus migrasi tenaga kerja ke kota-kota besar. Tersedianya peluang kerja di daerah memungkinkan masyarakat mempertahankan sumber penghidupan di wilayah asal. Dampak jangka panjangnya adalah terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat daerah (Hayati & Fatarib, 2022).

Di sisi lain, literatur akademik mengenai UMKM masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada pengukuran kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja melalui analisis statistik. Pendekatan tersebut memiliki nilai penting, namun belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika sosial yang berlangsung di tingkat akar rumput. Kajian kualitatif yang menggali pengalaman, persepsi, serta makna yang dibangun oleh pelaku UMKM masih relatif terbatas. Padahal, dimensi sosial dan kultural memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proses pemberdayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu diisi untuk memahami transformasi UMKM secara lebih mendalam dalam konteks pembangunan ekonomi daerah (Nurmulyani & Salmah, 2025).

Keterbatasan dalam penelitian terdahulu terutama tercermin dari masih sedikitnya kajian yang menelaah secara mendalam pengalaman empiris pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan struktural yang bersifat sistemik. Sejumlah penelitian belum secara

komprehensif menguraikan cara pelaku UMKM menyikapi keterbatasan akses terhadap permodalan, pasar, dan teknologi dalam aktivitas usaha sehari-hari. Di samping itu, jaringan sosial lokal sebagai sumber daya ekonomi dan sosial belum memperoleh perhatian analitis yang memadai. Padahal, relasi sosial kerap menjadi modal penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di tingkat lokal. Kajian mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan juga sering berhenti pada tataran normatif tanpa menelusuri realitas operasional di lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemahaman mengenai dinamika pemberdayaan UMKM belum tersaji secara utuh dan kontekstual (Ranika & Mayarni, 2024).

Kerangka konseptual pembangunan ekonomi lokal dan teori kewirausahaan menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan proses yang bersifat multidimensi. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, dan relasi ekonomi yang saling memengaruhi. Pendekatan yang bertumpu pada agregasi statistik cenderung menyederhanakan dan mengabaikan kompleksitas hubungan tersebut. Oleh sebab itu, kajian mengenai pemberdayaan UMKM perlu memasukkan perspektif sosial yang lebih mendalam. Pendekatan kualitatif membuka ruang untuk memahami pola interaksi antaraktor dalam ekosistem usaha lokal. Melalui pendekatan ini, praktik kewirausahaan dan strategi adaptasi dapat dimaknai secara lebih komprehensif (Fadillah, Ikhsan, & Amin, 2025).

Pendekatan kualitatif juga memberikan peluang bagi peneliti untuk menelusuri narasi transformasi sosial ekonomi yang dialami oleh pelaku UMKM. Pengalaman subjektif para pelaku usaha menjadi sumber pengetahuan yang esensial dalam memahami proses perubahan yang berlangsung. Selain itu, makna pemberdayaan dapat ditafsirkan dari sudut pandang komunitas lokal yang mengalaminya secara langsung. Penelitian dengan karakteristik ini mampu menangkap dinamika yang sering kali tidak terjangkau oleh instrumen pengukuran kuantitatif. Oleh karena itu, kajian kualitatif memiliki peran strategis dalam memperkaya literatur pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini juga relevan untuk menjelaskan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani kekosongan kajian yang masih ada. Arah penelitian difokuskan pada proses pemberdayaan UMKM dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah. Penekanan utama diberikan pada pengalaman, persepsi, serta praktik keseharian pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pemberdayaan diinterpretasikan dan dijalankan di tingkat lokal. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang dihadapi pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran empiris yang lebih kontekstual.

Tujuan utama penelitian ini adalah menggali secara kualitatif kontribusi pemberdayaan UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Pelaku UMKM dan pemangku kebijakan diposisikan sebagai sumber data utama dalam penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam guna mengungkap pengalaman serta pandangan subjektif para informan. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami praktik usaha dalam konteks nyata. Dokumentasi empiris dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan lapangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang bersifat holistik dan aplikatif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep dan kerangka pemberdayaan UMKM yang berlandaskan konteks lokal. Temuan yang dihasilkan dapat memperkaya perspektif pembangunan ekonomi daerah yang menekankan peran aktor dan proses. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memiliki nilai praktis bagi para perumus kebijakan. Hasil kajian dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Bagi praktisi, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang program pendampingan yang efektif. Dengan demikian, upaya pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan secara lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory)

Gagasan pemberdayaan berlandaskan pada kajian pembangunan sosial dan komunitas yang menitikberatkan penguatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu menentukan pilihan serta mengelola sumber daya yang berpengaruh terhadap kehidupannya (Zimmerman, 2000). Pemberdayaan tidak semata dimaknai sebagai penyaluran sumber daya material, melainkan mencakup aspek psikologis, kognitif, relasional, dan struktural yang memungkinkan individu atau komunitas meningkatkan posisi tawar serta kemandirian dalam tatanan sosial dan ekonomi (Perkins & Zimmerman, 1995).

Dalam konteks UMKM, konsep pemberdayaan menjadi krusial karena pelaku usaha skala kecil kerap berhadapan dengan keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, informasi pasar, serta jejaring usaha yang berdampak pada rendahnya kapasitas produksi dan daya saing (Haikal, Murtiana, & Haetami, 2025). Pelaku usaha atau kelompok yang mengalami proses pemberdayaan umumnya menunjukkan peningkatan rasa percaya diri, penguasaan keterampilan manajerial, kemampuan mengambil keputusan ekonomi, serta keberanian untuk berinovasi (Ibrahim, 2022). Atas dasar itu, Empowerment Theory menyediakan kerangka

konseptual yang kokoh untuk menjelaskan transformasi UMKM menjadi aktor pembangunan ekonomi daerah ketika pelaku usahanya memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya yang menentukan keberlangsungan usaha.

Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development / LED)

Teori pembangunan ekonomi lokal menekankan pendekatan pembangunan berbasis wilayah dengan mengoptimalkan potensi endogen daerah melalui kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat (Arofah & Murti, 2025). Dalam pendekatan LED, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada masuknya investasi eksternal, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya lokal—baik sumber daya manusia, sosial, maupun ekonomi—secara strategis dan inklusif.

Dalam kerangka LED, UMKM ditempatkan sebagai aktor kunci perekonomian lokal karena karakteristiknya yang adaptif, bersifat padat karya, dan memiliki keterikatan kuat dengan struktur sosial ekonomi masyarakat (Montoya, 1998). Pemberdayaan UMKM dalam perspektif ini tidak sekadar diarahkan pada peningkatan skala usaha, melainkan juga pada penguatan basis ekonomi lokal, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan (Arofah & Murti, 2025). Dengan demikian, LED memberikan landasan teoretis bahwa pemberdayaan UMKM merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.

Konsep UMKM dalam Ekonomi Pembangunan

UMKM dipahami sebagai unit usaha produktif yang beroperasi pada skala mikro hingga menengah dengan ciri utama berupa keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, serta sistem manajemen yang fleksibel. Meskipun berukuran kecil, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional karena jumlahnya yang dominan dan persebarannya yang luas di berbagai wilayah (Setyawati, Sudarmiatin, & Wardana, 2023).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, UMKM diposisikan sebagai penopang utama perekonomian melalui perannya dalam menciptakan nilai tambah di sektor riil, menyerap tenaga kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama ketika terjadi krisis ekonomi (Ibrahim, 2022). Di Indonesia, dominasi UMKM dalam struktur usaha nasional menjadikan sektor ini sebagai instrumen strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal.

Teori Ketenagakerjaan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Teori ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pembentukan kesempatan kerja tidak semata-mata bertumpu pada keberadaan sektor industri besar dan formal, melainkan juga

sangat dipengaruhi oleh sektor usaha kecil yang berciri padat karya serta memiliki tingkat fleksibilitas tinggi (Blakely & Bradshaw, 2017). Dalam konteks ini, UMKM kerap berfungsi sebagai saluran utama penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, pekerja informal, serta penduduk yang bermukim di wilayah perdesaan maupun daerah tertinggal.

Upaya pemberdayaan UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan keterampilan, peningkatan efisiensi proses produksi, serta penerapan inovasi sederhana yang selaras dengan kondisi lokal (Haikal et al., 2025). Oleh karena itu, peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja tidak hanya dapat dilihat dari aspek jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari peningkatan mutu kesempatan kerja serta stabilitas pendapatan yang diperoleh masyarakat.

Konsep Literasi dan Inklusi Keuangan dalam Pemberdayaan UMKM

Literasi keuangan dan inklusi keuangan dipandang sebagai komponen fundamental dalam proses pemberdayaan UMKM karena berkaitan erat dengan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan, memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan formal, serta membuat keputusan bisnis yang rasional dan terukur (Awaluddin, Paula, Tamriesfatno, & Khair, 2025). Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan memadai umumnya menunjukkan perencanaan usaha yang lebih sistematis, pengelolaan risiko yang lebih efektif, serta ketahanan usaha yang lebih kuat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM, baik dari sisi pertumbuhan usaha maupun keberlanjutan dalam jangka panjang (Setyawati et al., 2023). Dengan demikian, penguatan literasi keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemberdayaan UMKM dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah.

Hubungan Konseptual antara Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Lokal, dan Tenaga Kerja

Secara konseptual, pemberdayaan UMKM dapat dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, penguatan jejaring sosial, serta integrasi yang lebih baik ke dalam sistem pasar yang lebih luas. Proses tersebut diyakini berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas usaha, penciptaan kesempatan kerja, serta penguatan struktur ekonomi daerah (Ibrahim, 2022).

Hubungan antara pemberdayaan UMKM dan dinamika pasar tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki kapasitas dan daya saing yang lebih baik tidak

hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan efek pengganda ekonomi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat (Arofah & Murti, 2025).

Kajian Penelitian Terdahulu Terkait Pemberdayaan UMKM

Ibrahim (2022) menyoroti bahwa upaya pemberdayaan UMKM yang berbasis inovasi sosial serta pendekatan *collaborative governance* memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi, penurunan tingkat kemiskinan, dan pengurangan pengangguran. Arofah & Murti, (2025) mengungkapkan bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan, dukungan permodalan, serta regulasi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM, meskipun implementasinya masih dihadapkan pada persoalan koordinasi kelembagaan dan rendahnya literasi digital. Di sisi lain, Haikal et al., 2025) menegaskan bahwa keterbatasan akses modal, lemahnya literasi keuangan, serta sikap resistif terhadap inovasi masih menjadi faktor penghambat utama dalam mengoptimalkan peran UMKM bagi pembangunan ekonomi.

Kesenjangan Teoretis dan Empiris

Walaupun sejumlah penelitian telah membahas kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, kajian yang mengintegrasikan aspek pemberdayaan, pengalaman subjektif pelaku UMKM, serta dinamika ketenagakerjaan secara kualitatif dan menyeluruh masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada pendekatan kuantitatif, sehingga belum sepenuhnya mengungkap proses, makna, dan strategi adaptasi yang dijalankan UMKM dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berangkat dari kajian teoretis dan temuan penelitian sebelumnya, studi ini mengombinasikan *Empowerment Theory* sebagai landasan peningkatan kapasitas UMKM, teori pembangunan ekonomi lokal sebagai kerangka penguatan ekonomi daerah, serta teori ketenagakerjaan untuk menelaah implikasi pemberdayaan UMKM terhadap penciptaan dan kualitas kesempatan kerja di tingkat lokal.

Integrasi antara teori pemberdayaan, pembangunan ekonomi lokal, literasi dan inklusi keuangan, serta dinamika ketenagakerjaan membentuk fondasi konseptual yang komprehensif dalam menjelaskan kontribusi pemberdayaan UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Kerangka ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mendorong kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada tujuan penelitian untuk menelaah secara mendalam proses, makna, serta dinamika pemberdayaan UMKM dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja pada konteks wilayah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri fenomena secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melingkupi UMKM sebagai fokus utama analisis. Desain studi kasus dinilai tepat ketika perhatian penelitian tidak semata diarahkan pada capaian pemberdayaan UMKM, melainkan pada mekanisme dan alasan terjadinya proses pemberdayaan tersebut serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat lokal. Penelitian dilaksanakan di salah satu daerah yang memiliki konsentrasi UMKM aktif dan program pemberdayaan yang sedang berjalan, dengan rentang waktu penelitian pada periode 2024–2025 (Golam, Akhtari, & Lasmiyatun, 2024).

Subjek penelitian meliputi pelaku UMKM, pendamping UMKM, serta pemangku kepentingan terkait, seperti aparatur pemerintah daerah atau lembaga pendukung UMKM. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria meliputi: (1) pelaku UMKM yang telah terlibat dalam program pemberdayaan sekurang-kurangnya selama satu tahun, (2) memiliki pengalaman dalam merekrut tenaga kerja lokal, dan (3) bersedia menyampaikan informasi secara mendalam. Untuk memperluas cakupan data, teknik snowball sampling digunakan guna memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan awal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, serta studi dokumentasi terhadap laporan program, kebijakan daerah, dan arsip kegiatan UMKM. Penerapan beragam teknik tersebut bertujuan menghasilkan data yang kaya dan mendalam, sekaligus memungkinkan dilakukannya triangulasi metode dan sumber (Suryani, 2023).

Proses analisis data dilakukan secara bersamaan sejak tahap awal pengumpulan data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan pengodean dilakukan secara bertahap melalui initial coding dan pattern coding untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan bentuk pemberdayaan UMKM, dampaknya terhadap perekonomian lokal, serta implikasinya bagi penyerapan tenaga kerja. Keabsahan dan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, pelaksanaan member checking kepada informan kunci, serta penyusunan audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan penelitian memenuhi

prinsip kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sesuai dengan standar penelitian kualitatif kontemporer (Hulu, Ndaha, Hulu, & Waruwu, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dari wawancara mendalam terhadap lima informan yang meliputi pelaku UMKM, pendamping UMKM, serta perwakilan pemerintah daerah, teridentifikasi sejumlah tema sentral yang merefleksikan kontribusi pemberdayaan UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Proses analisis dilakukan secara tematik dengan menelusuri pola-pola makna yang berulang dalam narasi pengalaman dan persepsi para informan (Haikal et al., 2025).

Pemberdayaan UMKM sebagai Pendorong Peningkatan Kapasitas Usaha

Tema pertama yang teridentifikasi menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM berperan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kapasitas usaha. Para pelaku UMKM mengungkapkan bahwa berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan manajemen usaha, pendampingan intensif, serta dukungan permodalan, memberikan dampak langsung terhadap peningkatan omzet dan kapasitas produksi. Seorang pelaku UMKM di sektor kuliner menjelaskan bahwa setelah mengikuti pelatihan dan memperoleh akses permodalan, usahanya berkembang secara signifikan sehingga mampu memperluas skala produksi dan menjaga stabilitas usaha. Ia menyampaikan, “Setelah ikut pelatihan dan dapat bantuan modal, usaha saya lebih terarah, omzet naik, dan produksi bisa ditambah”. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan turut memperkuat kapasitas internal dan kemampuan adaptif pelaku usaha (Arofah & Murti, 2025).

Perluasan Akses Pasar melalui Pemberdayaan Berbasis Digital

Tema kedua berkaitan dengan kontribusi pemberdayaan UMKM dalam memperluas jangkauan pasar, terutama melalui penguatan kapasitas pemasaran digital. Pelaku UMKM di sektor kerajinan menyampaikan bahwa pemanfaatan platform digital memungkinkan produk yang dihasilkan menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk pasar di luar wilayah asal. Informan menegaskan bahwa keberhasilan pemasaran digital tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka menengah dan panjang. Ia menyatakan, “Setelah diajari pemasaran online, produk kami bisa dijual ke luar daerah, usaha jadi lebih stabil”. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis teknologi merupakan strategi strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital (Janah & Tampubolon, 2024)

Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Tema ketiga menegaskan adanya kontribusi nyata pemberdayaan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Peningkatan kapasitas dan perkembangan usaha mendorong pelaku UMKM untuk menambah jumlah tenaga kerja yang direkrut dari lingkungan sekitar. Pelaku UMKM di sektor kuliner dan jasa mengungkapkan bahwa ekspansi usaha membuka peluang kerja baru, khususnya bagi pemuda dan ibu rumah tangga. Salah satu informan menyatakan, “Kalau usaha berkembang, otomatis butuh tambahan tenaga kerja dari lingkungan sekitar”. Temuan ini memperkuat pemahaman mengenai peran UMKM sebagai penyedia lapangan kerja yang bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Awaluddin et al., 2025).

UMKM sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi Daerah

Tema keempat menyoroti posisi strategis UMKM sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Pendamping UMKM dan perwakilan pemerintah daerah memandang UMKM sebagai aktor penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Pendamping UMKM menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk serta efisiensi proses produksi, yang pada akhirnya memperkuat daya saing dan membuka peluang kerja baru. Sementara itu, perwakilan pemerintah daerah menegaskan bahwa UMKM menjadi instrumen utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai program, seperti fasilitasi perizinan, pelatihan, dan bantuan sarana produksi (Setyawati et al., 2023).

Dampak Sosial Pemberdayaan UMKM terhadap Inklusi Ekonomi

Tema terakhir berkaitan dengan dimensi sosial dari pemberdayaan UMKM. Pelaku UMKM di sektor jasa menekankan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang signifikan, khususnya dalam pemberdayaan kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan pemuda. Menurut informan, UMKM yang memperoleh dukungan secara optimal mampu membentuk ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM memiliki dimensi sosial yang penting dalam konteks pembangunan daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat (Kholifah & Andini, 2024).

Hasil penelitian ini secara konsisten memperkuat Empowerment Theory, yang menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses strategis untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok melalui penguatan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan peluang ekonomi. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaku UMKM

yang memperoleh pelatihan manajemen usaha, pendampingan berkelanjutan, serta dukungan permodalan mengalami peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha secara lebih terarah dan strategis. Peningkatan tersebut tercermin dari bertambahnya kapasitas produksi, stabilitas usaha, serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih rasional dan adaptif terhadap perubahan pasar. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Creswell dan Poth (2021) yang menekankan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami proses pemberdayaan secara mendalam dalam konteks sosial dan ekonomi yang spesifik (Setyawati et al., 2023).

Ditinjau dari perspektif teori pembangunan ekonomi lokal (local economic development), temuan penelitian ini mengonfirmasi peran UMKM sebagai aktor utama dalam menggerakkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi produktif, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan struktur ekonomi daerah. Kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja lokal menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang bersumber dari inisiatif masyarakat memiliki daya tahan yang lebih kuat dan bersifat inklusif. Hasil ini konsisten dengan temuan Rahman (2024) yang menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berimplikasi positif terhadap pengurangan pengangguran dan penguatan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan keterbatasan industri skala besar (Fadillah et al., 2025).

Temuan mengenai perluasan akses pasar melalui pemberdayaan berbasis digital memberikan kontribusi penting terhadap pengayaan literatur UMKM. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang umumnya menitikberatkan pada kontribusi UMKM terhadap PDB atau tingkat penyerapan tenaga kerja, penelitian ini mengungkap bagaimana digitalisasi dimaknai langsung oleh pelaku UMKM sebagai strategi keberlanjutan usaha. Pelatihan pemasaran digital tidak hanya meningkatkan jangkauan pasar dan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan dimensi pengalaman subjektif pelaku UMKM dalam proses transformasi ekonomi digital yang masih relatif terbatas dibahas dalam studi sebelumnya (Suryani, 2023).

Selanjutnya, temuan terkait kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja lokal semakin menegaskan posisi UMKM sebagai penyerap tenaga kerja informal dan semi-formal yang signifikan. Pemberdayaan UMKM mendorong ekspansi usaha yang secara langsung menciptakan kebutuhan tenaga kerja tambahan, khususnya bagi kelompok usia produktif. Temuan ini sejalan dengan Arofah et al. (2025) yang menyatakan bahwa penguatan UMKM berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja. Namun, penelitian ini memperluas

pemahaman dengan menyoroti aspek sosial dan inklusivitas tenaga kerja, seperti keterlibatan ibu rumah tangga dan pemuda, yang menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam membangun ekonomi lokal yang lebih adil dan partisipatif (Purnomo & Purwandari, 2025).

Secara teoretis, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam kajian pemberdayaan UMKM dengan menghadirkan perspektif kualitatif mengenai proses, dinamika, dan makna pemberdayaan dari sudut pandang pelaku UMKM, pendamping, dan pemerintah daerah. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM dalam merancang program pemberdayaan yang lebih kontekstual, terintegrasi, dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja lokal yang berkelanjutan. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak aktor, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar dinamika pemberdayaan UMKM dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah dapat dipahami secara lebih komprehensif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan memiliki peran sentral dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan mendorong pelaku UMKM untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk dan layanan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kinerja usaha secara keseluruhan. Pelaku UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan juga lebih mampu mengelola sumber daya secara efisien, mengambil keputusan strategis yang terukur, dan memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Selain itu, kewirausahaan juga berkorelasi positif dengan pemanfaatan teknologi digital, di mana UMKM yang proaktif dalam mengadopsi digital marketing, e-commerce, dan media sosial mampu meningkatkan jangkauan pasar serta pendapatan usaha. Dukungan eksternal seperti pelatihan, pendampingan, dan program pemerintah semakin memperkuat dampak positif kewirausahaan terhadap inovasi, daya saing, kinerja, dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, kewirausahaan tidak hanya menjadi motor inovasi, tetapi juga faktor utama yang memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, terutama di era persaingan global dan digitalisasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berperan signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang mencakup pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, serta dukungan pemasaran—

termasuk pemanfaatan teknologi digital—berkontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha pelaku UMKM. Peningkatan tersebut tercermin pada kemampuan memperluas akses pasar, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan skala produksi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada terciptanya lapangan kerja baru, khususnya bagi tenaga kerja lokal dan kelompok rentan. Dengan demikian, UMKM terbukti berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari perspektif teoretis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi empowerment theory dan teori pembangunan ekonomi lokal dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak semata menghasilkan output ekonomi, tetapi juga membangun kapasitas sosial, kemandirian, dan daya adaptasi pelaku usaha. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur dengan menghadirkan pemahaman mendalam mengenai proses dan makna pemberdayaan UMKM dari sudut pandang pelaku usaha, pendamping, dan pemerintah daerah, yang selama ini relatif kurang dieksplorasi dalam kajian yang didominasi oleh pendekatan kuantitatif.

Secara praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya perancangan program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil pelaku usaha. Pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM perlu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyediakan pendampingan berkelanjutan, meningkatkan literasi manajerial dan digital, serta membangun ekosistem usaha yang kondusif agar UMKM mampu berkembang secara optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

Sebagai implikasi akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan melibatkan variasi jenis UMKM yang lebih beragam guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemberdayaan UMKM di berbagai konteks daerah. Selain itu, penggunaan pendekatan mixed methods dapat menjadi alternatif strategis untuk memperkuat generalisasi temuan sekaligus memperdalam analisis dampak pemberdayaan UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemberdayaan UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah disarankan untuk merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha. Program tidak hanya berfokus pada bantuan modal, tetapi juga harus disertai pendampingan jangka panjang,

pelatihan manajerial, serta peningkatan literasi digital agar UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi. Selain itu, perlu diperkuat kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem usaha yang kondusif, seperti kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan perluasan jaringan pemasaran.

Bagi Lembaga Pendamping dan Pendukung UMKM

Lembaga pendamping UMKM diharapkan meningkatkan kualitas dan intensitas pendampingan, terutama dalam aspek inovasi produk, strategi pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan usaha. Pendampingan sebaiknya bersifat partisipatif dan kontekstual, menyesuaikan dengan karakteristik usaha dan latar belakang pelaku UMKM agar proses pemberdayaan benar-benar membangun kemandirian, bukan ketergantungan.

Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM disarankan untuk lebih proaktif dalam mengikuti program pelatihan dan pendampingan yang tersedia serta terus mengembangkan kemampuan manajerial dan pemanfaatan teknologi digital. Kemauan untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jejaring usaha akan sangat menentukan keberlanjutan dan daya saing usaha di tengah dinamika pasar.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan melibatkan jenis UMKM yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola dan dampak pemberdayaan UMKM. Selain itu, penggunaan pendekatan mixed methods dapat dipertimbangkan untuk mengombinasikan kedalaman analisis kualitatif dengan kekuatan generalisasi data kuantitatif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan teori dan kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan serta berbagai pihak yang telah membantu penyediaan data dan referensi. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan UMKM dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arofah, Z., & Murti, I. (2025). *STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI: Studi Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 5(02), 60-68.
- Awaluddin, S. P., Paula, E. W., Tamriesfatno, S., & Khair, A. U. (2025). Empowering communities through financial literacy initiatives for SME development. *Golden Ratio of Community Services and Dedication*, 5(2), 10-21. <https://doi.org/10.52970/grcsd.v5i2.589>
- Fadillah, T. D., Ikhsan, A., & Amin, N. A. (2025). Local economic development strategy through human resource empowerment in the MSME sector in Medan City. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 7(2), 286-304. <https://doi.org/10.15575/aksy.v7i2.46252>
- Golam, M. Y., Akhtari, M., & Lasmiatun, K. M. T. (2024). Analysis of public sector involvement in local economic empowerment as implementation of micro and small enterprise development policies. *Multifinance*, 1(3), 259-271. <https://doi.org/10.61397/mfc.v1i3.113>
- Haikal, F. M., Murtiana, S., & Haetami, H. (2025). Strategi pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia: Strategies for empowering small and medium enterprises to boost Indonesia's economic growth. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(6), 1727-1736. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1064>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa peran UMKM terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53-62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Hayati, S., & Fatarib, H. (2022). The role of small and medium micro enterprises (MSMEs) in economic development in Bandar Lampung. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(3), 571-576. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.247>
- Hulu, E., Ndraha, A. B., Hulu, F., & Waruwu, R. M. P. (2025). Analisis peran dinas UMKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2837-2844. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1551>
- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui pendekatan inovasi sosial dan collaborative governance. *Ilmu Dan Budaya*, 43(1), 103-116. <https://doi.org/10.47313/jib.v43i1.1532>
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739-746. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Kholifah, A. N., & Andini, C. T. (2024). Peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3, 459-466. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4588>
- Murdani, M., & Hadromi, H. (2019). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152-157.

- Nurmulyani, N., & Salmah, E. (2025). The role of micro, small and medium enterprises in improving the local economy in Rumbuk Village, Sakra District, East Lombok Regency. *Media for Empowerment, Mobilization, and Innovation in Research & Community*, 1(2). Retrieved from <https://memoirs-c.org/index.php/main/article/view/18>
- Purnomo, S., & Purwandari, S. (2025). A comprehensive micro, small, and medium enterprise empowerment model for developing sustainable tourism villages in rural communities: A perspective. *Sustainability*, 17(4), 1368. <https://doi.org/10.3390/su17041368>
- Ranika, M., & Mayarni, M. (2024). Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 01-08. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.153>
- Setyawati, A., Sudarmiatin, S., & Wardana, L. W. (2023). Empowering MSMEs: The impact of financial literacy and inclusion: Systematic literature review. *International Journal of Economics and Management Research*, 2(3), 121-138. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v2i3.132>
- Suryani, D. A. (2023). Pengembangan sumberdaya manusia UMKM berbasis potensi lokal di Yogyakarta. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 269-279. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.933>